

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Abdullah. 2017. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amanademen*. Jakarta; Kencana.
- Ario Prio Agus Santoso, et al. 2022. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta; Pustaka Baru Press.
- Deddy Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Edi Siswadi. 2012. *Reengineering BUMD: Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan yang Unggul*. Bandung; Mutiara Press.
- Enrico Simanjuntak. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Fajlurrahman Jurdi. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta; Rangkang Education.
- Harrys Pratama Tegus dan Ojarudin Ritonga. 2022. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pedoman dan Praktik Penyelesaian Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta; Penerbit Andi.
- I Dewa Gede Atmadja. 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang; Setara Press.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta; Mirra Buana Media.
- Jimly Assiddiqie. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Mas Bakar. 2010. *Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi*. Yogyakarta; Rangkang Education.

Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.

Soedaryono. 2000. *Tata Laksana Kantor*. Jakarta; Bumi Aksara.

Suratman. 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok; PT RajaGrafindo Persada.

Yuslim. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta; Sinar Grafika.

Zairin Harahap. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Revisi. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.

Zairin Harahap. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal:

Ramadhani Rizki dan Maharini Rizki. "Status Hukum Pegawai Perusahaan Daerah dalam Pola Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan BUMD". Jurnal Hukum Sol Justicia. Universitas Kader Bangsa. Volume 4. 2021.

Sri Hartini. "Upaya Keberatan Terhadap PNS yang Dijatuhi Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat". Jurnal Dinamika Hukum. Universitas Jenderal Soedirman. Volume 11 Nomor 2. 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang mengatur mengenai struktur organisasi kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 85/G/2022/PTUN.MKS

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 8/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks